

## **BAB IV**

### **ALASAN MALAYSIA MELAKUKAN DESAKAN KEPADA PEMERINTAH MYANMAR UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK ROHINGYA**

Bagi Malaysia, konflik Rohingya adalah perkara serius yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, telah banyak upaya desakan dilakukan Pemerintah Malaysia yang ditujukan kepada Pemerintah Myanmar selaku otoritas di negara bagian Rakhine tempat konflik ini terjadi dan tempat tinggal etnis Rohingya yang sebenarnya. Malaysia juga mengangkat dan membicarakan isu ini ke berbagai tingkatan baik pada tingkatan negara-negara kawasan Asia Tenggara maupun Internasional.

Desakan-desakan Malaysia tersebut pada dasarnya adalah bentuk sikap yang ditujukan Malaysia kepada Pemerintah Myanmar. Berdasarkan teori yang telah disebutkan pada pendahuluan tulisan ini dengan mengimplementasikannya pada sikap Malaysia yang melakukan desakan-desakan tersebut kepada Myanmar, maka desakan-desakan tersebut dapat disebut sebagai *Foreign Policy Role Performance*, kemudian desakan-desakan tersebut muncul dikarenakan terbentuknya konsepsi-konsepsi peran nasional yang telah ditentukan oleh pengambil kebijakan (*Policymaker's National Role Conceptions*) di Malaysia yang mana peran yang diambil adalah *Defender of The Faith*. Peran *Defender of The Faith* yang diambil Malaysia dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam negara Malaysia sendiri maupun faktor dari luar negeri Malaysia. Namun, didalam tulisan ini penulis berargumen bahwa peran yang diambil Malaysia tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar negara (*Alter's Role Prescriptions*) Malaysia, tepatnya berasal dari komitmen yang terdapat didalam *ASEAN Charter*.

Pemerintah Malaysia mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik Rohingya dalam rangka untuk

menjaga agar prinsip-prinsip yang tertuang didalam ASEAN Charter tetap dilaksanakan oleh seluruh anggota ASEAN, yang mana Myanmar juga termasuk anggota ASEAN. Prinsip-prinsip fundamental tersebut pada dasarnya dilakukan untuk dapat mencapai tujuan ASEAN yang akan berdampak positif bagi negara-negara anggota ASEAN. Prinsip-prinsip yang berusaha diperjuangkan oleh Malaysia antara lain:

#### **A. PRINSIP untuk MENJAGA PERDAMAIAN dan KEAMANAN**

Dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tercantum prinsip yang berbunyi “(b) *shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;...*”<sup>66</sup>. Isi-isi prinsip yang terdapat didalam desakan-desakan Malaysia, lebih menekankan kepada prinsip perdamaian dan keamanan bagi kawasan Asia Tenggara dalam konteks konflik ini. Malaysia melihat bahwa konflik Rohingya dapat mengancam perdamaian yang sudah terjalin antar negara ASEAN, yang juga pada akhirnya akan berdampak pada keamanan kawasan. Ketika didalam forum *ASEAN Foreign Ministers’ Retreat* yang diselenggarakan pada 19 Desember 2016, Malaysia mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik Rohingya dengan disertai penekanan untuk konsisten menjaga perdamaian dan keamanan ASEAN. Kata-kata yang mereka lontarkan seperti:

*Malaysia therefore urges the Government of Myanmar to take all necessary steps to restore peace and stability in the affected areas . . . as we understand it, it was revealed that the violent attacks were organised by terrorist organisation believed to be linked and trained by the Taliban. If this allegation is true, then we should be conscious that there are possibilities that the ISIS could be taking advantage of the situation . . . The act of terrorism should be condemned and ASEAN should be at the forefront of fighting to ensure peace and stability*

---

<sup>66</sup> Nations, *Loc.Cit.*

*in the region*<sup>67</sup>. (Pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, YB Dato' Sri Anifah Hj. Aman dalam acara *The ASEAN Foreign Ministers Retreat* di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016)

Kemudian prinsip-prinsip tersebut dinyatakan kembali dalam pernyataan resmi Malaysia ketika penyelenggaraan forum *OIC Contact Group on The Rohingya Muslim Minority in Myanmar* di kota New York, pada 19 September 2017, dan Malaysia mengajak peserta forum untuk ikut bergerak bersama mengatasi konflik Rohingya. Dalam pernyataannya, Malaysia menyampaikan:

*The Precarious situation provides a fertile breeding ground for recruitment of extremists. It is a well-known fact that the Daesh is now seeking to make South East Asia and South Asia as its nest and bedrock. Should this happen, Malaysia and neighbouring countries would bear the brunt of serious instability to the region*<sup>68</sup>. (Pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, YB Dato' Sri Anifah Hj. Aman, dalam kegiatan *The OIC Contact Group on The Rohingya Muslim Minority in Myanmar*, New York, 19 September 2017.)

Menteri Luar Negeri, Anifah Aman, kembali menyuarakan desakan secara tidak langsung lewat suatu forum konferensi internasional pada 15 Maret 2017 dan mengatakan bahwa konflik Rohingya berbahaya bagi keamanan ASEAN: *"If left unaddressed, the situation in Rakhine State could potentially impact the security and stability of the region"*<sup>69</sup>. (Pernyataan

---

<sup>67</sup> Aman I, *Loc.Cit.*

<sup>68</sup> Aman II, *Loc.Cit.*

<sup>69</sup> Aman III, *Loc.Cit.*

Menteri Luar Negeri Malaysia, YB Dato' Sri Anifah Hj. Aman, dalam acara *International Conference on Rohingya 2017: The Plight of Rohingya: Searching for Solutions*, di Malaysia, 15 Maret 2017)

Malaysia mengatakan bahwa akibat dari konflik ini, banyak etnis Rohingya yang melarikan diri keluar dari Myanmar dapat menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia yang dijual ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia dan lain-lain. Kemudian keberadaan pengungsi etnis Rohingya ini telah menjadi ancaman bagi keamanan Malaysia sendiri<sup>70</sup>. Kemudian ancaman lain yaitu terorisme. Malaysia berpendapat bahwa potensi terorisme akibat krisis ini sudah mulai terjadi. Malaysia telah menahan pelaku terorisme yang akan mengadakan perjuangan melawan Myanmar. Kemudian, ARSA yang merupakan pemicu awal konflik ini juga dibuktikan memiliki hubungan dengan kelompok teroris di timur tengah hal ini dikemukakan oleh *International Crisis Group* walaupun ARSA membantahnya<sup>71</sup>.

## **B. PELARANGAN PENGGUNAAN KEKUATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL**

Prinsip didalam Piagam ASEAN selanjutnya yang diperjuangkan oleh Malaysia yaitu “(c) *renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;...*”<sup>72</sup>. Malaysia melihat bahwa dalam menyelesaikan konflik di Rakhine, Pemerintah Myanmar menggunakan kekuatan militer yang sangat keras dan akhirnya tindakan keras tersebut juga dirasakan masyarakat sipil etnis Rohingya. Malaysia menyebut

---

<sup>70</sup> Menon, *Loc.Cit.*

<sup>71</sup> Stefan Bepler, *Op.Cit.*, h. 7.

<sup>72</sup> Nations, *Loc.Cit.*

bahwa telah banyak laporan dugaan tindakan kekerasan oleh militer Myanmar yang mana adanya penangkapan semena-mena oleh militer, banyak rumah dan properti mereka terbakar begitu juga desa-desa mereka, pembunuhan termasuk pada anak-anak, pemerkosaan oleh tentara, yang akhirnya banyak dari etnis Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Perwakilan Myanmar dalam forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* membela tindakan keras militer tersebut yang mengarahkannya kepada etnis Rohingya karena Myanmar. Namun Malaysia kemudian bereaksi menanggapi pembelaan perwakilan Myanmar tersebut dengan mengatakan tidak akan bisa menerima situasi tersebut<sup>73</sup>. Dalam kesempatan lain, Anifah Aman di Kuala Lumpur mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia telah mendesak keras Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan penghancuran atas rumah-rumah dan hidup mereka (etnis Rohingya)<sup>74</sup>.

### **C. MENDORONG dan MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA**

Prinsip selanjutnya yaitu “ *(i) respect of fundamental freedoms, thye promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;..* ”<sup>75</sup>. Pernyataan mereka yang menunjukkan usaha ini adalah seperti didalam forum *ASEAN Foreign Ministers’ Retreat* pada 19 Desember 2016 :

*Although Myanmar may not recognise the Rohingya as its citizen, we must not forget that they deserve basic human rights. Thus we believe that fundamental civil,*

---

<sup>73</sup> Bernama III, *Loc.Cit.*

<sup>74</sup> The Malaysian Insight, 'Malaysia tells Myanmar to stop Rohingya atrocities, disagrees with ASEAN stand', *Today* (online), 25 September 2017, <<https://www.todayonline.com/world/malaysia-tells-myanmar-stop-rohingya-atrocities-disagrees-asean-stand>>.

<sup>75</sup> Nations, *Loc.Cit.*

*economic, social, and cultural rights must be provided to all those who reside in the Rakhine State regardless of their ethnicity, race, or religion. . .We hope the Government of Myanmar would be able to deal with the situation in a fair and just manner, according to the international principles on the protection of human rights which are also enshrined in the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Declaration*<sup>76</sup>.(Pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, YB Dato' Sri Anifah Hj. Aman, didalam forum *The ASEAN Foreign Ministers Retreat*, di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016)

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ketika memimpin demonstrasi protes pada Desember 2016 dinegaranya mengatakan “*Ada sebuah artikel dalam Piagam ASEAN yang mengatakan bahwa negara ASEAN harus menegakkan HAM. . .Dunia tidak hanya bisa duduk dan menonton genosida yang terjadi.*”<sup>77</sup> (Pidato Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, saat memimpin aksi protes di Kuala Lumpur Malaysia, Desember 2016.)

#### **D. MENGEDEPANKAN CARA-CARA DAMAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA**

Prinsip selanjutnya yaitu “*(d) reliance on peaceful settlement of disputes;...*”<sup>78</sup>. Malaysia menegur Pemerintah Myanmar yang menggunakan kekerasan berlebihan dalam menangani konflik. Bahkan Jendral Thein Sein pernah mengumumkan bahwa ia akan menggunakan kekuatan militer

---

<sup>76</sup> Aman I, *Loc.Cit.*

<sup>77</sup> Astiana, *Loc.Cit.*

<sup>78</sup> Nations, *Loc.Cit.*

untuk menyelesaikan konflik, yang justru pada akhirnya menyebabkan konflik terjadi semakin parah. Oleh karena itu, Malaysia mendesak agar Pemerintah Myanmar menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya, Aung San Suu Kyi membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine, komisi ini diketuai oleh Kofi A. Annan, seorang mantan Sekretaris Jendral PBB. Komisi tersebut telah membuat laporan terkait kondisi Rakhine, dan juga telah membuat berbagai macam rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik di Rakhine. Malaysia mendesak agar Myanmar untuk segera melakukan implementasi rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat tersebut karena rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan adalah cara-cara damai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik di Rakhine. Desakan Malaysia tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya, Anifah Amman *“We also urge Myanmar to fulfill its commitment to immediately implement the recommendations of the final report of the Advisory Commission on the Rakhine State<sup>79</sup>”*. (Pernyataan Menteri Luar Negeri YB Dato’ Sri Anifah Hj. Aman kepada pers yang salah satunya dipublikasikan oleh media daring [www.todayonline.com](http://www.todayonline.com) pada tanggal 25 September 2017.)

Rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh komisi tersebut ditujukan untuk berbagai bidang penting yang harus segera diselesaikan seperti bidang perkembangan sosial dan ekonomi Rakhine, persoalan kewarganegaraan yang menyinggung hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, kebebasan pergerakan masyarakat, para pengungsi internal, akses untuk bantuan kemanusiaan, akses masuk bagi media, tentang persoalan pendidikan, kesehatan, ancaman peredaran obat-obatan terlarang, partisipasi dan representasi masyarakat untuk pembangunan daerah, keeratan hubungan antar

---

<sup>79</sup> Insight, *Loc.Cit.*

golongan masyarakat, akses ke pengadilan, sektor keamanan, tentang masalah perbatasan dan hubungan dengan Bangladesh, serta hubungan dengan kawasan<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Advisory Commission On Rakhine State, *Towards a Peaceful, Fair, and Prosperous Future for The People of Rakhine*, 2017, h. 20-61.